

Pedagogi Lokal: Pemanfaatan Tradisi ‘*Lahan kakaluk*’ sebagai Sumber Belajar Sejarah Politik di STKIP Sinar Pancasila

Seran Clotilde¹, Bere Antonius²

STKIP Sinar Pancasila

Email: dotildeseran@gmail.com; kiaksoelerek@gmail.com

ABSTRAK

Pembelajaran sejarah politik di perguruan tinggi selama ini masih didominasi oleh narasi nasional dan negara-sentris, sehingga kurang memberi ruang pada dinamika politik lokal yang hidup dalam masyarakat. Padahal, tradisi dan ritual adat menyimpan nilai-nilai politik yang penting sebagai sumber belajar kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang terkandung dalam tradisi *Lahan kakaluk* di Soka Wanibesak, Kabupaten Malaka, (2) menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut dengan pembelajaran sejarah politik, dan (3) merumuskan model pedagogi lokal berbasis tradisi adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnopedagogik. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Lahan kakaluk* mengandung nilai kepemimpinan adat, musyawarah, legitimasi kekuasaan, solidaritas sosial, serta kontrol sosial yang berfungsi sebagai sistem politik lokal. Nilai-nilai tersebut relevan untuk dikembangkan sebagai sumber belajar sejarah politik melalui model pedagogi lokal yang kontekstual dan selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran sejarah politik guna membangun kesadaran kritis dan identitas budaya mahasiswa.

Kata kunci: *Lahan kakaluk*, sejarah politik, pedagogi lokal, etnopedagogik, Malaka

ABSTRACT

Political history learning in higher education has been dominated by national and state-centric narratives, thus providing little space for the local political dynamics that exist within society. However, traditional traditions and rituals contain important political values that serve as contextual learning resources. This study aims to (1) identify the social, political, and cultural values contained in the Lahan kakaluk tradition in Soka Wanibesak, Malaka Regency, (2) analyze the relevance of these values to the learning of political history, and (3) formulate a local pedagogical model based on traditional traditions. This research employed a descriptive qualitative method with an ethnopedagogical approach. Data collection techniques included participant observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results indicate that the Lahan Kakaluk tradition embodies the values of customary leadership, deliberation, legitimacy of power, social solidarity, and social control, which function as a local political system. These values are relevant for development as a learning resource for political history through a contextual local pedagogical model aligned with the Merdeka Belajar–Kampus Merdeka policy. This research emphasizes the importance of integrating local wisdom into political history learning to build critical awareness and cultural identity in students.

Keywords: *Lahan Kakaluk*, political history, local pedagogy, ethnopedagogy, Malaka

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan sejarah politik di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa terhadap dinamika kekuasaan, kebijakan publik, dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah politik masih dominan bersumber pada peristiwa dan tokoh-tokoh nasional, sementara konteks lokal yang kaya akan nilai politik dan budaya sering kali belum diangkat secara optimal (Susanto, 2022).

Akibatnya, mahasiswa kurang memahami keterkaitan antara sejarah politik nasional dan dinamika politik yang berkembang di lingkungan sosial budayanya sendiri.

Salah satu konteks lokal yang memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber belajar sejarah politik adalah **tradisi “*Lahan Kakaluk*”** di Soka Wanibesak, Desa Lorotulus, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Tradisi ini merupakan ritual adat turun-temurun yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada leluhur sekaligus memperkuat solidaritas sosial antarwarga. Dalam pelaksanaannya, *Lahan Kakaluk* mengandung nilai-nilai kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, serta relasi sosial yang mencerminkan sistem politik tradisional masyarakat Malaka (Wawancara dengan Wilhelmus Bere, 2025).

Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pintu masuk dalam memahami dinamika politik masyarakat lokal yang berakar pada struktur adat, sekaligus menjadi **sumber belajar kontekstual** bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Melalui pembelajaran berbasis tradisi lokal, mahasiswa tidak hanya memahami teori politik dari literatur modern, tetapi juga mempelajari praktik politik yang tumbuh dari akar budaya masyarakatnya sendiri (Saptomo, 2021). Di sisi lain, kebijakan nasional melalui **Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)** menekankan pentingnya pengembangan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan pengalaman empiris mahasiswa (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Hal ini membuka ruang bagi dosen dan peneliti untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam proses pembelajaran formal di perguruan tinggi. Dengan demikian, pengkajian *Lahan Kakaluk* sebagai sumber belajar sejarah politik menjadi relevan baik secara akademik maupun kebijakan pendidikan.

Namun demikian, sejauh ini masih sedikit penelitian yang mengkaji tradisi *Lahan Kakaluk* dari perspektif pedagogi **lokal dan sejarah politik**. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek budaya dan upacara adat tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai politik dan relevansinya dalam pembelajaran sejarah (Tukan, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya **kesenjangan penelitian (*research gap*)** yang perlu diisi, khususnya dalam konteks pengembangan model pedagogi berbasis budaya lokal di wilayah Malaka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai sosial, politik, dan budaya dalam tradisi *Lahan Kakaluk* serta mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran sejarah politik di STKIP Sinar Pancasila. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat model **pedagogi lokal (*local pedagogy*)** sebagai pendekatan pembelajaran yang kontekstual, transformatif, dan berakar pada budaya bangsa.

Tinjauan Pustaka

Pedagogi lokal didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengintegrasikan nilai, kearifan, praktik, dan konteks sosial-budaya setempat ke dalam proses pendidikan formal (Widyastuti, 2020). Pendekatan ini berakar pada pandangan konstruktivisme sosial, yang meyakini bahwa pengetahuan paling efektif dibangun ketika peserta didik berinteraksi dengan lingkungan nyata dan budayanya sendiri. Pedagogi lokal berfokus pada: a) Konteksualisasi: Menghubungkan materi

pelajaran dengan realitas dan pengalaman hidup mahasiswa di lingkungan lokal; b) Emansipasi: Memberdayakan mahasiswa untuk menjadi agen pelestarian dan pengembangan budaya lokalnya sendiri; c) Relevansi: Meningkatkan makna pembelajaran karena materi bersumber langsung dari kearifan yang mereka kenal.

Dalam konteks pembelajaran sejarah, pedagogi lokal berperan penting dalam mendekonstruksi narasi sejarah yang bersifat sentralistik (Kartodirdjo, 2014). Dengan memanfaatkan sumber sejarah lokal (seperti tradisi, artefak, atau cerita lisan), mahasiswa didorong untuk; a) Mengembangkan sensitivitas historis terhadap dinamika kekuasaan dan sosial di tingkat akar rumput, b) Memahami pluralitas interpretasi sejarah, di luar narasi resmi.

Sejarah politik adalah studi tentang kekuasaan (*power*), otoritas, pemerintahan, dan kebijakan publik dalam ruang dan waktu (Smith J, 2018). Kajian ini telah berkembang melampaui fokus tradisional pada tokoh besar, perang, dan institusi Negara. Arah Baru Sejarah politik modern kini mencakup studi tentang politik akar rumput (*grassroots politics*), struktur sosial-politik informal, dan bagaimana kebijakan memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari (Scoot J.C, 1985).

Sejarah politik lokal berfokus pada dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas atau regional. Ini melibatkan studi tentang: Sistem politik tradisional (adat, kepala suku, dewan adat), Relasi kekuasaan antara struktur adat dan struktur negara formal, Mekanisme negosiasi dan konflik dalam komunitas yang mencerminkan praktik politik. Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai politik lokal membentuk identitas dan perilaku kolektif (Hobsbawm, E. J., 1990).

Tradisi dan ritual adat, seperti *Lahan Kakaluk*, dapat dikaji sebagai sistem sosial-politik yang terinstitusionalisasi (Geertz, C, 1980). Ritual adat sering kali menjadi cerminan dari struktur dan mekanisme politik masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi dapat menyimpan nilai-nilai politik yang meliputi: a) Kepemimpinan dan Otoritas: Siapa yang memimpin ritual dan bagaimana otoritasnya diakui oleh komunitas, b) Pengambilan Keputusan (Musyawarah): Tahapan-tahapan yang memerlukan konsensus atau kesepakatan kolektif, c) Solidaritas dan Kontrol Sosial: Norma-norma yang mengatur hubungan antarwarga dan upaya menjaga stabilitas sosial, yang merupakan fungsi esensial dari sistem politik.

Kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi dapat memberikan perspektif yang unik terhadap isu-isu kontemporer (Hardjono, S. 2017) seperti : Pengelolaan Sumber Daya: Tradisi sering memuat aturan adat tentang pembagian dan konservasi sumber daya, yang merupakan bentuk kebijakan publik lokal dan Keberlanjutan: Nilai-nilai yang mengajarkan harmoni antara manusia dan alam, relevan dengan studi politik lingkungan.

Kebijakan MBKM, khususnya pada pilar pengembangan kearifan lokal dan pembelajaran berbasis proyek/komunitas, menjadi landasan kebijakan yang kuat untuk penelitian ini (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). a) Integrasi Kurikulum: MBKM memberikan fleksibilitas bagi perguruan tinggi

untuk mengintegrasikan konteks lokal ke dalam kurikulum formal, sehingga tradisi *Laban Kakaluk* dapat disajikan bukan hanya sebagai materi tambahan, tetapi sebagai sumber belajar utama dalam mata kuliah sejarah politik, b) Pembelajaran Empiris: MBKM mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam praktik sosial-budaya masyarakat, yang dalam penelitian ini berarti mempelajari praktik politik secara empiris melalui observasi dan partisipasi dalam tradisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Lokasi penelitian adalah Desa Soka Wanibesak, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat (*fukun*), pemegang kakaluk (*mane makaer kakaluk nain*), serta anggota masyarakat yang terlibat dalam tradisi lahan kakaluk. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif selama pelaksanaan ritual, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Tradisi *lahan kakaluk* Soka Wanibesak

Soka Wanibesak, Desa Lorotulus merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, yang hingga kini masih memegang teguh dan melestarikan tradisi *Laban Kakaluk* sebagai bagian penting dari sistem sosial-budaya masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan secara kolektif oleh beberapa rumah suku utama, khususnya *Uma kakaluk*. Secara etimologis istilah *lahan kakaluk* berasal dari bahasa *tetun* Wanibesak yaitu *lahan* yang berarti upacara atau ritual adat dan *kakaluk* artinya kekuatan magis. Dengan demikian, *Laban Kakaluk* dapat dimaknai sebagai ritual adat yang berkaitan dengan perolehan dan pengelolaan kekuatan magis yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kehidupan individu maupun kolektif masyarakat.

Masyarakat Soka Wanibesak meyakini bahwa pelaksanaan *Laban Kakaluk* dapat menghasilkan kekuatan tertentu yang dapat dimanfaatkan baik untuk tujuan positif maupun negatif. Dalam aspek positif, kekuatan tersebut dipercaya mampu mendatangkan hasil pertanian yang melimpah, memberikan keberanian dan kekebalan tubuh dalam menghadapi peperangan, serta menjadi sarana penyembuhan berbagai jenis penyakit melalui pengobatan tradisional. Namun demikian, masyarakat juga menyadari potensi penyalahgunaan kekuatan tersebut, misalnya untuk tindakan kriminal seperti pencurian, dengan keyakinan bahwa pelaku dapat menghindari deteksi, membuat korban tertidur pulas, atau kehilangan kemampuan untuk berteriak. (Nahak, Thomas; Wawancara *fukun frei*, 20 Desember 2025).

Tradisi *Laban Kakaluk* dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dan menjadi tanggung jawab utama rumah suku *Uma Betori*, khususnya *Uma Makbalin Molin* yang berfungsi sebagai *uma kakaluk* (rumah pemilik kekuatan). Peserta ritual tidak hanya berasal dari *Uma Betori*, tetapi juga melibatkan dua suku lain, yakni Suku *Uma Dato Bot* dan Suku *Uma Sokalor*. Keterlibatan lintas suku ini menunjukkan bahwa *Laban*

Kakaluk bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan juga mekanisme sosial-politik yang memperkuat relasi, solidaritas, dan struktur kekuasaan antar-suku di Soka Wanibesak.

Berikut tahapan pelaksanaan tradisi *laban kakaluk* (Nahak, Kontradus; Wawancara 03 Januari 2026):

1. Tahap Persiapan

Tahap awal dimulai dengan persiapan berbagai sarana ritual oleh keluarga besar *Uma Kakaluk*. Hewan yang disiapkan harus memenuhi kriteria adat tertentu, yakni ayam berbulu merah dengan kaki berwarna hitam serta babi berwarna hitam polos tanpa potongan ekor dan telinga. Selain itu, sirih dan pinang juga dipersiapkan sebagai simbol penghormatan dan penyambutan bagi para tamu adat.

2. Duduk Bersama (*Tur Mutu*)

Tahapan *tur mutu* merupakan forum musyawarah adat yang dipimpin oleh *fukun frei* dari *Uma Katuas*. Dalam forum ini, para *fukun fetu* dan *fukun mane* dari *Uma Dato Bot* dan *Uma Sokalor* diwajibkan hadir untuk menentukan waktu pelaksanaan ritual serta kesiapan teknis dan adat. Keputusan diambil secara kolektif dan bersifat mengikat, mencerminkan mekanisme pengambilan keputusan politik tradisional berbasis konsensus.

3. Undangan Awal (*Hamata*)

Setelah kesepakatan dicapai, keluarga *Uma Kakaluk* mengundang seluruh anggota dari dua suku lainnya untuk menyampaikan secara resmi waktu pelaksanaan ritual *Laban Kakaluk*.

4. Menumbuk Jagung (*Fai batar*)

Tahap *fai* merupakan pembuka ritual yang ditandai dengan aktivitas menumbuk jagung menggunakan lesung dan alu. Seluruh perempuan remaja dan dewasa dari ketiga suku terlibat dalam kegiatan ini selama tiga hari. Tahap ini ditutup dengan ritual *duil lesun*, yaitu membalik lesung sebagai tanda berakhirnya proses menumbuk.

5. Undangan Kedua (*Hamata*)

Setelah *duil lesun*, dilakukan undangan kembali yang berisi pembagian tugas secara adat berdasarkan gender dan afiliasi suku, seperti pencarian kayu bakar, penimbaan air, pembersihan beras, dan pengambilan ranting pohon kalak.

Terdapat empat hal yang menjadi pokok undangan, yakni :

- a. Besok pagi semua anak muda perempuan mencari kayu bakar dan menimba air (*feto foi wai, hili ai maran no kuru we*)
- b. Orang tua perempuan membersihkan beras (*feto ferik hili fos kakun*)
- c. Semua laki-laki baik itu remaja maupun orang tua wajib mencari kayu dari pohon cemara di hutan (*mane leo soka ktomak ba buka ai kaken*)
- d. Dan yang mencari ranting dari pohon kalak (*ailumeta lotu*) adalah dari laki-laki suku *betori*.

e. Pembagian kerja ini mencerminkan struktur sosial dan peran politik dalam komunitas adat.

6. Kerja Bersama (*Karian Hamutu*)

Jika semua kayu yang dibutuhkan sudah terkumpul dan sudah dibawa ke *uma kakaluk*, kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan *ksidin* (lingkaran kecil terbuat dari kayu cemara yang ditancap di tanah dan diikat dengan ranting melinjo dan dibuat. Pekerjaan *ksidin* dilakukan oleh laki-laki. Sementara yang dilakukan oleh orang tua perempuan adalah mulai menyiapkan sirih pinang (*fuiik no bua*) untuk dibawa ke rumah suku *uma dato betori* sebagai simbol mengundang raja dari tiga suku besar (*Nain Kiik Serani*). Sirih dan pinang disimpan di tempat sirih pinang yang dianyam menggunakan daun lontar dan memiliki tutup (*hanmatan mutin no tatakan*). Selain sirih pinang dibawa juga seekor ayam jantan berwarna putih dan kaki putih juga beras secukupnya untuk dimasak.

7. Penghitungan Sirih Pinang Pemali (*Sura Mama Lulik*)

Setelah dilakukan sesajen di *uma dato betori*, kembali ke *uma kakaluk* dan sampai di sana, dibentang tikar yang telah dianyam menggunakan daun lontar di tempat yang bernama *lalori* (semacam tempat duduk dan tempat tidur yang terbuat dari kayu papan di sudut kiri rumah panggung) untuk disimpan sirih pinang pertanda *nain kiik serani* (Raja tiga suku besar) telah diundang dan telah hadir bersama-sama di *uma kakaluk*. Dan tidak ada seorang pun yang duduk di *lalori* tersebut.

Selanjutnya semua orang tua perempuan (*ferik*) dari *uma kakaluk*, *uma katuas* dan *uma sokalor* mulai menghitung sirih pinang pemali (*sura mama lulik no bua lulik*). Adapun ketentuan dalam penghitungan sirih pinang pemali adalah sebagai berikut : a) Sirih dan pinang pemali sebanyak 7 kali 7 sampai 7 kali = 343 daun sirih dan 343 lempeng pinang, b) Sirih dan pinang pemali sebanyak 5 kali 5 sampai 5 kali = 125 daun sirih dan 125 lempeng pinang, c) Sirih dan pinang pemali sebanyak 3 kali 3 sampai 3 kali = 27 daun sirih dan 27 lempeng pinang, d) Sirih dan pinang pemali sebanyak 2 kali 2 sampai 2 kali = 8 daun sirih dan 8 lempeng pinang, e) Sirih dan pinang pemali sebanyak 1 kali 1 sampai 1 kali = 1 daun sirih dan 1 lempeng pinang, f) Ditotal secara keseluruhan = 504 daun sirih dan 504 lempeng pinang.

Seorang laki-laki dari suku *uma betori* ditugaskan untuk mengambil daun pisang pemali (*budi lamak lulik*) (dengan ketentuan harus pucuk daun pisang ambon : dalam bahasa tetun disebut *kubus budi luan*) dan berfungsi sebagai tempat menyimpan sesajen di dalam *uma kakaluk* maupun di luar di *ksidin*.

Tahap ini memiliki makna spiritual sekaligus politis sebagai legitimasi kehadiran kekuasaan adat tertinggi.

8. Pelaksanaan Inti *Lahan Kakaluk*

Puncak ritual melibatkan peran-peran adat yang sangat terstruktur, termasuk dua perempuan penumbuk, dua laki-laki penjaga lesung, serta satu tokoh sentral yaitu *mane makaer kakaluk nain* sebagai

pemegang otoritas penuh atas kekuatan magis. Seluruh simbol, pakaian, alat, dan gerakan ritual mencerminkan legitimasi kekuasaan adat dan relasi antara manusia, leluhur, dan alam.

Berikut pelaksanaan ritual *laban kakaluk* :

- a. Dua orang perempuan (harus berasal dari suku *sokolor* : *uan mane kawaiik* dan suku *betori* : *uan mane kiik*), menggunakan kain tenun berwarna hitam pekat tanpa campuran warna lain (*kulan metan*), tidak memakai sandal, dan mengikat kain tenun tersebut di atas dada (*kabala ba karas*), tanpa memakai atasan, rambut disanggul dan berkonde (*ulun babanin tau sasuit sukun*). Tugas dari dua perempuan ini adalah menumbuk.
- b. Selanjutnya dua orang laki-laki (harus berasal dari suku *sokolor* : *uan mane kawaiik* dan suku *betori* : *uan mane kiik*), ditugaskan mengambil lesung dan alu yang sudah disiapkan untuk di pakai menumbuk, membenteng gajang yang sudah dianyam dan disiapkan untuk dibenteng persis di depan *ksidin* yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh laki-laki. Posisi lesung dan alu masih dalam keadaan melintang. Mereka juga bertugas sebagai penjaga lesung saat kedua perempuan menumbuk.
- c. Seorang laki-laki lagi (*mane makaer kakaluk nain*), berasal dari suku *uma kakaluk* dan dipercaya sebagai pemegang kunci tradisi *laban kakaluk* (oleh karena hal terkait kekuatan magis yang dipercayai jika kita ingin menggunakan nantinya harus berasal dari tangan beliau sendiri). Pakaian yang digunakan adalah mengenakan kain tenun cirikhas soka wanibesak (*tais mane*), satu kain lagi dipakai untuk mengikat kain di pinggang, menggunakan destar (*hameti lesu*), bulu ayam jantan yang panjang disisipkan tepat di depan kepala di atas destar (*sibak manu lain tau ba ulun*), menyandang tas dan kelewang (*kakakuk lulik no surik lulik*), serta memegang tombak (*diman lulik*). Semua kekuatan saat prosesi *laban kakaluk* berada di tangan *mane makaer kakaluk nain* oleh karenanya yang bertugas sebagai *mane makaer kakaluk nain* menjadi symbol kekuatan penuh untuk ketiga suku besar yang ada di Soka Wanibesak Desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.
- d. Setelah semua personel dan semua yang dibutuhkan telah dipersiapkan, termasuk padi merah sebagai pangan yang akan ditumbuk, selanjutnya dua perempuan yang akan menumbuk, keluar dari dalam rumah adat *uma kakaluk* ke depan rumah, perempuan *fukun* dari suku *uan mane kawaiik* dan *uan mane kiik* dan beberapa orang lagi perempuan dewasa yang bertugas untuk menapis padi jika sudah ditumbuk nantinya, bersama dua orang laki-laki yang bertugas untuk memegang lesung jika sudah dalam keadaan berdiri vertical untuk berjalan menuju gajang dan lesung yang sebelumnya sudah disiapkan.
- e. Selanjutnya *mane makaer laban kakaluk* mulai melakukan ritual adat dengan menghentakkan kaki ke tanah sambil melantuan syair-syair adat sebagai symbol komunikasi spiritual antara manusia dan alam (*basas*). Setelahnya dilakukan menumbuk simbolis sebanyak tujuh kali menggunakan tombak yang dipegang, bergantian mengambil kelewang dilakukan sebanyak tujuh kali tepat

disamping lesung, mengambil alu untuk menumbuk secara simbolis sebanyak enam kali dan kali ketujuhnya alu langsung dimasukkan ke lubang lesung untuk selanjutnya diambil alih oleh para perempuan yang bertugas menumbuk padi hingga selesai.

- f. Selesai menumbuk padi, dilanjutkan dengan menyimpan padi kedalam rumah dan dua perempuan dari suku *uan mane kawaik* dan *uan mane kiik* ditugaskan lagi ambil tempayan yang terbuat dari tanah liat (*lolo lulik*) bersama *mane makaer kakaluk nain* untuk mengambil air pemali. Mereka berdua juga bertugas memasak makanan sesajen (*etu no naan lulik*). Tempat masak yang digunakan adalah harus terbuat dari tanah liat dan berbentuk segitiga (melambangkan Tri Tunggal Maha Kudus dan *nain uma tolus*). Kayu bakar yang dipakai untuk memasak pun harus dari kayu bakar kusambi dan langsung diambil oleh laki-laki pemegang *kakaluk nain*.
- g. Untuk makanan dari banyak orang nantinya dimasak di luar rumah adat dan dimasak oleh siapa saja sampai menjelang subuh semuanya sudah siap untuk dimakan. Menjelang pagi, tiga rumah suku besar (*feto mane kiik kawaik fukun katuas kiik kawaik*) kembali berkumpul lagi ke *uma kakaluk* untuk makan bersama. Sebelum makan bersama dimulai dengan memberikan sesajen kepada leluhur yang dilakukan oleh *fukun* dari *uan mane kawaik* dan *uan mane kiik*. Ketentuan makan, laki-laki mengambil makan di *ksidin* di luar yang sudah di buat, sementara para perempuan bisa mengambil makan di dalam rumah, dan makan tanpa berbicara sampai makanan habis dimakan.
- h. setelah makan dilanjutkan dengan menerima sirih pinang pemali (*fuik bua lulik*). Ketentuan masih tetap sama, laki-laki menerima di *ksidin* dan perempuan menerima di dalam rumah. Menerima tanpa bicara, dan diusahakan untuk tidak boleh jatuh setelah itu dimakan, ditelan semua airnya, jangan meludah.

9. Penutupan Ritual

Ritual ditutup dengan makan bersama dan penerimaan sirih pinang pemali sesuai ketentuan adat. Dengan diterimanya sirih pinang tersebut, seluruh rangkaian *Lahan Kakaluk* dinyatakan selesai dan akan kembali dilaksanakan setelah tiga tahun.

Nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang terkandung dalam tradisi *Lahan kakaluk* di Soka Wanibesak, Desa Lorotolus

1. Nilai Sosial dalam Tradisi *Lahan kakaluk*

Berdasarkan data lapangan, tradisi *Lahan kakaluk* di Soka Wanibesak mengandung nilai sosial yang kuat, terutama dalam bentuk solidaritas sosial, kerja kolektif, dan kohesi antar-suku. Hal ini terlihat dari keterlibatan tiga suku besar (*Uma Betori*, *Uma Dato Bot*, dan *Uma Sokalor*) dalam seluruh rangkaian ritual, mulai dari persiapan hingga penutupan.

Tahapan seperti *fai* (menumbuk jagung), *karian hamutu* (kerja bersama), serta makan bersama di akhir ritual menunjukkan praktik gotong royong yang terinstitusionalisasi. Seluruh anggota komunitas menjalankan peran masing-masing tanpa imbalan material, melainkan atas dasar kewajiban adat dan

kesadaran kolektif. Nilai ini sejalan dengan pandangan Geertz (1980) yang menyatakan bahwa ritual adat berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang menjaga stabilitas dan keberlanjutan masyarakat tradisional.

Selain itu, pembagian kerja berdasarkan usia, gender, dan afiliasi suku mencerminkan sistem sosial yang tertata. Perempuan, khususnya perempuan tua (*ferik*), memiliki posisi penting dalam penghitungan sirih pinang pemali (*sura mama lulik*), yang menandakan bahwa otoritas sosial tidak hanya dimonopoli oleh laki-laki. Hal ini memperkuat temuan Scott (1985) bahwa praktik sosial masyarakat lokal sering kali menyimpan bentuk kekuasaan tersembunyi (*everyday forms of power*) yang tidak selalu tampak dalam struktur formal.

Dengan demikian, *Lahan kakaluk* berfungsi sebagai sarana reproduksi nilai sosial berupa kebersamaan, disiplin kolektif, dan kepatuhan terhadap norma adat, yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Soka Wanibesak.

Nilai Politik dalam Tradisi *Lahan kakaluk*

Tradisi *Lahan kakaluk* juga mengandung nilai-nilai politik yang kuat, khususnya terkait kepemimpinan, pengambilan keputusan, legitimasi kekuasaan, dan distribusi otoritas. Nilai politik ini tampak jelas dalam tahapan *tur mutu* (duduk bersama), yang berfungsi sebagai forum musyawarah adat.

Dalam *tur mutu*, para *fukun fetu* dan *fukun mane* dari ketiga suku diwajibkan hadir tanpa pengecualian untuk menentukan waktu pelaksanaan ritual dan kesiapan seluruh unsur adat. Keputusan diambil melalui konsensus, bukan melalui paksaan atau dominasi satu pihak. Mekanisme ini mencerminkan praktik politik deliberatif di tingkat lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Smith (2018) bahwa sejarah politik modern tidak hanya berfokus pada negara, tetapi juga pada praktik kekuasaan di tingkat komunitas.

Posisi *mane makaer kakaluk nain* sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam ritual menunjukkan bentuk kepemimpinan simbolik sekaligus substantif. Ia tidak hanya memimpin prosesi ritual, tetapi juga menjadi representasi kekuatan kolektif tiga suku besar. Kekuasaan yang dimilikinya bersifat terbatas secara adat, karena hanya berlaku dalam konteks ritual dan diawasi oleh norma kolektif. Hal ini sejalan dengan konsep kekuasaan tradisional yang dijelaskan oleh Hobsbawm (1990), di mana legitimasi otoritas bersumber dari tradisi dan pengakuan sosial, bukan dari struktur negara formal.

Lebih jauh, aturan ketat terkait siapa yang boleh berbicara, bergerak, dan menerima sirih pinang pemali menunjukkan adanya sistem kontrol sosial yang berfungsi menjaga stabilitas dan ketertiban komunitas. Dalam konteks ini, *Lahan kakaluk* dapat dipahami sebagai praktik politik lokal yang mengatur relasi kekuasaan, kepatuhan, dan legitimasi secara simbolik.

Nilai Budaya dalam Tradisi *Lahan kakaluk*

Nilai budaya dalam tradisi *Lahan kakaluk* tercermin melalui simbol, bahasa ritual, pakaian adat, serta penggunaan benda-benda sakral seperti sirih pinang pemali, lesung, alu, dan tempayan tanah liat (*lolo*

lulik). Keseluruhan simbol tersebut membentuk sistem makna yang menghubungkan manusia, leluhur, dan alam.

Penggunaan angka simbolik dalam penghitungan sirih pinang pemali (504 daun sirih dan 504 lempeng pinang) menunjukkan adanya kosmologi budaya yang mengatur keseimbangan spiritual dan sosial. Menurut Geertz (1980), simbol-simbol ritual semacam ini berfungsi sebagai “bahasa budaya” yang mentransmisikan nilai dan pandangan hidup suatu masyarakat dari generasi ke generasi.

Selain itu, keyakinan bahwa kekuatan kakaluk dapat digunakan untuk tujuan positif maupun negatif mencerminkan pandangan dualistik masyarakat terhadap kekuasaan. Kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral, melainkan harus dikendalikan melalui norma dan etika adat. Pandangan ini memperkuat argumen Scott (1985) bahwa praktik kekuasaan lokal selalu dilekatkan pada nilai moral dan kontrol sosial.

Dengan demikian, *Lahan kakaluk* tidak hanya merupakan ekspresi budaya, tetapi juga wahana pewarisan nilai, identitas kolektif, dan etika politik masyarakat Malaka.

Relevansi Nilai Lahan Kakaluk dengan Pembelajaran Sejarah Politik

Nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang terkandung dalam tradisi Lahan Kakaluk memiliki relevansi yang kuat dengan materi pembelajaran sejarah politik di perguruan tinggi. Dalam kajian sejarah politik modern, fokus tidak lagi terbatas pada negara dan elite politik, tetapi juga pada praktik kekuasaan di tingkat lokal dan komunitas (Smith, 2018). Melalui Lahan Kakaluk, mahasiswa dapat memahami konsep-konsep sejarah politik seperti:

1. Kekuasaan tradisional dan legitimasi adat
2. Musyawarah dan konsensus sebagai mekanisme politik
3. Relasi antara struktur adat dan struktur sosial
4. Kontrol sosial dan stabilitas politik komunitas

Pendekatan ini sejalan dengan kritik Kartodirdjo (2014) terhadap narasi sejarah yang terlalu sentralistik. Dengan memanfaatkan tradisi lokal sebagai sumber belajar, mahasiswa diajak untuk melihat sejarah politik sebagai proses yang hidup dan dekat dengan realitas sosial mereka sendiri.

Selain itu, pembelajaran berbasis tradisi Lahan Kakaluk memungkinkan mahasiswa mengembangkan sensitivitas historis dan kesadaran politik lokal, sebagaimana dianjurkan oleh Saptomo (2021) dalam pengembangan sumber belajar kontekstual.

Model Pedagogi Lokal Berbasis Tradisi Lahan Kakaluk

Berdasarkan temuan penelitian, model pedagogi yang relevan untuk mengembangkan pembelajaran sejarah politik di STKIP Sinar Pancasila adalah model pedagogi lokal berbasis etnopedagogik. Model ini mengintegrasikan pengalaman budaya lokal ke dalam proses pembelajaran formal.

Secara konseptual, model ini berlandaskan teori pedagogi lokal (Widyastuti, 2020) dan konstruktivisme sosial Vygotsky (1978), yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan konteks budaya.

Model pedagogi ini dapat dirancang melalui tahapan berikut:

1. Eksplorasi Konteks Lokal

Mahasiswa mempelajari deskripsi dan tahapan tradisi *Laban Kakaluk* melalui studi literatur, video dokumentasi, dan hasil observasi lapangan.

2. Analisis Historis-Politik

Mahasiswa menganalisis nilai kepemimpinan, musyawarah, dan legitimasi kekuasaan dalam tradisi tersebut dengan menggunakan konsep sejarah politik.

3. Refleksi Kritis

Mahasiswa membandingkan sistem politik adat dengan sistem politik modern, serta merefleksikan relevansinya dalam kehidupan berbangsa saat ini.

4. Produksi Pengetahuan

Mahasiswa menyusun esai, laporan, atau proyek berbasis komunitas sebagai bentuk internalisasi pembelajaran.

Model ini selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, pengalaman empiris, dan kearifan lokal (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *Laban Kakaluk* di Soka Wanibesak, Desa Lorotulus, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan sistem sosial-budaya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang kompleks serta relevan sebagai sumber belajar sejarah politik di perguruan tinggi. Pertama, tradisi *Laban Kakaluk* mengandung nilai sosial yang kuat berupa solidaritas, gotong royong, dan kohesi antar-suku. Keterlibatan tiga suku besar (*Uma Betori*, *Uma Dato Bot*, dan *Uma Sokalor*) dalam seluruh tahapan ritual menunjukkan adanya mekanisme integrasi sosial yang terinstitusionalisasi melalui adat. Pembagian peran berdasarkan usia, gender, dan afiliasi suku mencerminkan tatanan sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keberlanjutan komunitas. Kedua, dari perspektif sejarah politik, *Laban Kakaluk* merepresentasikan praktik politik lokal yang hidup dan dinamis. Mekanisme musyawarah adat (*tur mutu*), kepemimpinan simbolik *mane makaer kakaluk nain*, serta sistem kontrol sosial melalui aturan ritual menunjukkan adanya sistem kekuasaan tradisional yang legitimasi dan otoritasnya bersumber dari norma adat dan pengakuan kolektif.

Tradisi ini membuktikan bahwa praktik politik tidak hanya berlangsung dalam ruang negara formal, tetapi juga berakar kuat dalam struktur sosial-budaya masyarakat lokal. Ketiga, nilai budaya dalam

tradisi *Laban Kakaluk* tercermin melalui simbol-simbol ritual, bahasa adat, serta kepercayaan terhadap relasi antara manusia, leluhur, dan alam. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai media transmisi pengetahuan, etika, dan identitas kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, *Laban Kakaluk* tidak hanya berperan sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai wahana pendidikan informal yang membentuk kesadaran sosial dan politik masyarakat. Keempat, integrasi nilai-nilai tradisi *Laban Kakaluk* ke dalam pembelajaran sejarah politik di STKIP Sinar Pancasila terbukti relevan dan strategis. Melalui pendekatan pedagogi lokal berbasis etnopedagogik, mahasiswa dapat memahami konsep-konsep sejarah politik secara kontekstual, kritis, dan bermakna. Model pembelajaran ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, kearifan lokal, dan keterlibatan langsung dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Djobu, F. S. (2023). *Nilai-Nilai Kepemimpinan dalam Ritual Adat Masyarakat Malaka (Studi Kasus Laban Kakaluk)*. *Antropologi Indonesia*, 47(1), 58-75.
- Geertz, C. (1980). *Negara Teater: Kekuasaan dan Ritual di Bali Abad Kesembilan Belas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardjono, S. (2017). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 6(1), 1-15.
- Hobsbawm, E. J. (1990). *Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saptomo, I. A. (2021). *Pemanfaatan Sumber Belajar Kontekstual dalam Pendidikan Sejarah*. *Edisi Jurnal Pendidikan*, 12(3), 201-215.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Smith, J. M. (2018). *The Evolution of Political History: Power, People, and Policy*. London: Routledge.
- Susanto, A. (2022). *Dilema Kurikulum Sejarah: Antara Narasi Nasional dan Kontestasi Lokal*. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 15(2), 145-160.
- Tukan, M. L. (2019). *Kajian Etnografi Upacara Adat di Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 30-45.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Widyastuti, A. (2020). *Pedagogi Lokal: Kerangka Konseptual Pendidikan Berbasis Kearifan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

